

# Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab

Volume 21 Issue 2 July 2024

ISSN Print: 1693-8135 | ISSN Online: 2686-4231

Penerbit: Departemen Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

Nationally Accredited Journal, Decree No. 200/M/KPT/2020

This Work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## Moderasi Islam, Salafisme, dan Reformasi Kerajaan Arab Saudi oleh Muhammad bin Salman (MBS)

M. Zulifan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Indonesia. e-mail: [arabicstudies15@gmail.com](mailto:arabicstudies15@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji penggunaan istilah moderat dan moderasi Islam dalam berbagai isu sosial dan politik di dunia Islam, khususnya di Arab Saudi. Istilah moderasi Islam (*wasathiyah*) menjadi populer setelah peristiwa 9/11 pada tahun 2001 yang mengubah peta gerakan Islam kontemporer. Dalam konteks kekuasaan, istilah moderasi Islam digunakan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai salah satu strategi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui media sosial di dunia Islam yang dianalisis secara kritis sebagai diskursus (wacana). Teori Governmentality Foucault (1980) digunakan sebagai alat analisis untuk menelaah penggunaan istilah moderasi Islam dalam berbagai kepentingan kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa istilah moderasi Islam digunakan sebagai strategi kekuasaan oleh pemerintah Arab Saudi yang dijalankan oleh Muhammad bin Salman (MBS). Dengan wacana moderasi Islam, MBS dapat mengontrol kekuasaan termasuk meminggirkan ulama yang tidak sepaham dengannya. MBS juga menggunakan wacana moderasi Islam untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya dari kalangan yang awalnya mungkin skeptis terhadap agenda reformasi dalam Visi Saudi 2030.

**Kata Kunci:** Moderasi Islam; Arab Saudi; Visi Saudi 2030; Governmentality.

---

### **Abstract:**

This study examines the use of the terms "moderate" and "moderation of Islam" in various social and political issues in the Islamic world, particularly in Saudi Arabia. The term "moderation of Islam" (*wasathiyah*) gained popularity after the events of 9/11 in 2001, which altered the landscape of contemporary Islamic movements. In the context of power, the term "moderation of Islam" is employed by the Saudi government as a strategic tool. This research employs a qualitative method, utilizing information obtained through social media in the Islamic world, critically analyzed as discourse. Foucault's (1980) theory of Governmentality is used as an analytical tool to examine the use of the term "moderation of Islam" in various power interests. The study finds that the term "moderation of Islam" is

*used as a power strategy by the Saudi government, orchestrated by Muhammad bin Salman (MBS). Through the discourse of moderation of Islam, MBS is able to control power, including marginalizing clerics who do not align with his views. MBS also uses the discourse of moderation of Islam to gain support from the public, particularly from segments of society that may have initially been skeptical of the reform agenda outlined in Saudi Vision 2030.*

**Keywords:** *Moderation of Islam; Saudi Arabia; Saudi Vision 2030; Governmentality.*

## 1. Pendahuluan

Sejak peristiwa 9/11 pada tahun 2001, isu ekstremisme di dunia Islam menjadi tema utama media dunia. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok al-Qaeda dan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) telah berkontribusi lebih lanjut dalam perkembangan isu ini. Alhasil, muslim kemudian dipahami melalui bingkai biner “radikal” versus “moderat” terutama oleh media Barat.

Istilah muslim moderat dimaknai sebagai mereka yang berpikiran terbuka, toleran, dan anti-kekerasan, sedang muslim radikal kemudian ditafsirkan sebagai muslim yang dogmatis, tidak toleran dan rentan melakukan kekerasan. Secara politik dibentuk pula perbedaan oposisi antara kelompok Islam moderat dan radikal. Kelompok Islam moderat dipahami sebagai muslim yang apolitis dan sesuai dengan nilai-nilai liberal, sedang Islam radikal dipahami sebagai ideologi kekerasan dan totaliter yang mengancam masyarakat demokratis. Konsekuensinya, dibentuk sebuah pemahaman bahwa sudah selayaknya umat Islam “moderat” harus melawan kalangan “Islam radikal (Van Es, 2021:161).

Sebagai sebuah istilah, term moderat ataupun radikal tentu tidak datang begitu saja, namun merupakan sebuah konstruksi dari pemahaman tertentu. Makna itu retak, karena itu ia kemudian harus direkatkan dengan kuasa tertentu (Christomy, 2002). Kata-kata seperti ekstremisme, jihadisme dan terorisme bukanlah istilah analitis yang netral, tetapi terkait konsep politik dengan sejarah dan konsekuensi tertentu. Dengan demikian, istilah-istilah ini layak untuk dianalisis secara kritis.

Terkait hal tersebut, MBS dalam Visi Saudi 2030 yang diluncurkan pada 2016 menyebutkan istilah moderasi Islam (*Islam wasatiyyah*) sebagai sebuah ide baru pemahaman Islam. Penggunaan istilah ini dalam membangun pemahaman Islam di Kerajaan yang sebelumnya terkenal dengan semangat konservatifnya dalam memahami ajaran Islam tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah Kerajaan Arab Saudi kini akan meninggalkan Wahhabisme dan beralih kepada pemahaman yang lebih moderat?

Istilah moderasi disebutkan secara khusus dalam poin pertama Visi Saudi 2030, yaitu *Vibrant Society*:

*LIVING BY ISLAMIC VALUES*

*“Islam and its teachings are our way of life. They are the basis of all our laws, decisions, actions and goals. Following Islam’s guidance on the values of hard-work, dedication, and excellence, Prophet Mohammed, Peace Be Upon Him, said: “That Allah loves us to master our work”. Therefore, the principles of Islam will be the driving force for us to realize our Vision. The values of moderation, tolerance, excellence, discipline, equity, and transparency will be the bedrock of our success” (Saudi Vision 2030:16)*

Terlihat bahwa MBS sedari awal mewacanakan moderasi Islam dalam agenda reformasi Kerajaan. Istilah moderasi Islam kemudian digunakan sebagai salah satu wacana yang bertujuan untuk mengabsahkan kepentingan penguasa Kerajaan sehingga berterima di masyarakat dan tidak melahirkan antikekuasaan. Dalam konteks Visi Saudi 2030, MBS menggunakan wacana moderasi Islam sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan Arab Saudi yang lebih modern. Visi tersebut menjadi suatu agenda yang memerlukan rasionalitas, karena pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada pandangan ulama semata, melainkan juga pemikiran yang tersistem dan logis. Hal ini mendorong MBS untuk mengabaikan pandangan ulama konservatif dalam pelaksanaan agenda reformasinya.

Di masa sebelumnya, Arab Saudi menerapkan sistem sosial yang ketat, namun dengan peluncuran Visi Saudi 2030, masyarakat Saudi mendapati dirinya memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri di ruang publik. MBS percaya bahwa dengan mendorong moderasi dalam ajaran Islam, negaranya dapat mencapai kemajuan yang lebih besar, sambil memungkinkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam proses transformasi menuju negara yang lebih modern.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Data tersebut berasal dari buku, jurnal, media sosial seperti youtube, skripsi dan sumber internet.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis kemudian dideskripsikan dan akhirnya membentuk suatu

kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya. Sebagaimana disebutkan Moleong (2005:6), penelitian jenis ini menekankan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motif-motif tertentu, dan hal lainnya secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode.

### **2.1. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *governmentality* oleh Foucault (1980). Teori *governmentality* oleh Michel Foucault merupakan kerangka konseptual yang mendalam dalam memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dan diinternalisasi dalam masyarakat modern. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh lembaga negara atau individu tertentu, tetapi tersebar dalam berbagai institusi dan praktik sehari-hari dalam masyarakat. Konsep ini mengilustrasikan bagaimana kekuasaan bekerja melalui proses-proses yang meliputi regulasi, kontrol, dan pembentukan subjek.

Dalam konteks Arab Saudi era MBS, teori *governmentality* Foucault dapat diterapkan untuk memahami bagaimana MBS menggunakan berbagai mekanisme kekuasaan untuk mencapai tujuannya dalam mengubah dan modernisasi Kerajaan. Salah satu contohnya adalah melalui langkah-langkah reformasi sosial dan ekonomi, seperti mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan bekerja di sektor-sektor yang sebelumnya terbatas bagi mereka. Dengan melakukan ini, MBS menggunakan kebijakan publik untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat, sambil memperkuat otoritasnya sebagai pemimpin yang berorientasi pada masa depan.

Selain itu, MBS juga menggunakan lembaga-lembaga keagamaan dan media untuk menyebarkan narasi-narasi yang mendukung visinya tentang modernisasi Arab Saudi. Dengan mengendalikan produksi pengetahuan dan mempengaruhi cara masyarakat memahami agama dan kebijakan publik, MBS dapat membentuk persepsi dan sikap yang mendukung agenda reformasinya.

Dengan demikian, teori *governmentality* Foucault memberikan kerangka analisis untuk memahami dinamika kekuasaan dan praktik-praktik kebijakan yang digunakan oleh MBS dalam mewujudkan Visi Saudi 2030 dan mencapai tujuannya dalam modernisasi Kerajaan Arab Saudi.

### 3. Hasil

Dalam Moderat berasal dari bahasa Latin “moderatio”, yaitu ke-sedang-an artinya tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan “moderation” yaitu sikap sederhana, sikap sedang. Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Seseorang dikatakan moderat jika bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Oleh karena itu, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Saifuddin, 2019).

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath (وسط) atau wasathiyah (وسطية), yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith (واسط). Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

As-Shalaby (1979:13) menerangkan kata al-wasth (الوسط) merupakan pola zharf yang berarti baina (di antara). Sedangkan kata al-wasathu (الوسط), mengandung empat pengertian, yaitu: pertama, kata benda (ism) yang bermakna posisi pertengahan diantara dua posisi bersebrangan. Kedua, sebagai kata sifat yang berarti pilihan (khiyâr), utama (afdhal), dan terbaik (ajwad). Ketiga, mengandung arti ‘adl (adil). Keempat, mengandung arti sesuatu yang berada diantara hal yang baik dan hal yang buruk/netral (الشيء بين الجيد والردع).

Sebagaimana disinggung Zamimah (2018:81), secara umum konsep wasathiyah secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: pertama, sebagai kata benda (ism) dengan pola zharf yang lebih bersifat kongkrit (hissî), yaitu sebagai perantara atau penghubung (interface/al-bainiyyah) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi bersebrangan. Kedua, lebih bersifat abstrak (theoretical) yang berarti terbaik, adil, pilihan, dan utama (superiority/al-khiyâr).

Kata wasith sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Dari semua ungkapan ini maka moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha adil dan berimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian moderasi beragama dapat dipahami

sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dia menambahkan lagi bahwa dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Saifuddin 2019).

Al-Qur'an sendiri menyebut term wasatha (وسط) sebanyak 5 kali (Zamimah, 2018:83). Adapun term wasatha tersebut sebagai berikut:

1. صَارَ فِي الْوَسْطِ (berpindah ke tengah barisan), yaitu merangseknya pasukan berkuda ketengah-tengah medan perang untuk memporak-porandakan barisan musuh; menggunakan kata wash. Makna ini terkandung dalam surah al-Adiyat [100]: 5

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

“Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh”

2. أَعْدَلَ وَ أَعْقَلَ (lebih adil dan lebih berakal); menggunakan kata awsathuhum dan wustha. Makna ini terkandung dalam surah al-Qalam [68]: 28 dan al-Baqarah [2]: 238

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

“Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?” (QS. Al-Qalam:28)

3. Lebih dekat dengan kepantasan antara boros dan bakhil; menggunakan kata awsath. Makna ini terkandung dalam surah al-Mâidah [5]: 89

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ ...

dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu,

4. Sebagai sifat yang menunjukkan keutamaan dan keadilan; menggunakan kata ummatan Wasathan. Makna ini terkandung dalam surah al-Baqarah [2]: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

“Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang pertengahan, supaya kamu menjadi saksi-saksi atas manusia dan Rasul akan menjadi saksi atas kamu...” (Q.S. Al-baqarah: 143)

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat (2019:14) telah merumuskan 10 karakteristik paham keislaman moderat, yakni Jalan tengah (tawassuth), Berkeseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (I'tidal), Toleransi (tasamuh), Egaliter (musawah), Mengedepankan musyawarah (Syura), Berjiwa reformasi (ishlah), Mendahulukan yang prioritas (aulawiyat), Dinamis dan innovative (tatawwur wa ibtikar) dan Berkeadaban (tahadhur).

Sementara ulama Islam Yusuf Qaradhawi (1983:127) menyatakan bahwa wasathiyah yang dapat disebut juga dengan at-tawazun, merupakan upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Lanjut Qaradhawi, bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut wasath (وسط) yang bermakna baik, seperti dalam sebuah hadis; خير الأمور أوسطها “Sebaik-baik urusan adalah awasathuha (yang pertengahan)”. Hal tersebut karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Kebanyakan sifat-sifat baik adalah pertengahan antara dua sifat buruk, seperti sifat berani yang menengahi antara takut dan sembrono, dermawan yang menengahi antara kikir dan boros, dan lainnya.

Dari kata ini pula lahir kata wasit dalam bahasa Indonesia yang bermakna; pertama, penengah; perantara (dagang dsb); kedua, penentu; pemimpin (dalam pertandingan sepakbola, bola, voli, dsb); ketiga, pemisah; pelerai (antara yang berselisih dsb). Jika moderat artinya seimbang, maka lawannya adalah radikalisme (al-ghulat aw at-tatharruf) yang merupakan paham dan sikap keras dan ekstrem dalam masalah akidah, ibadah, perilaku dan politik (Ad-Dzuhaily, 2010). Radikalisme sebagai sikap yang ekstrem (ghuluw) sangat bertentangan dengan paham moderat dalam Islam, sebab keluar dari keadilan, keseimbangan dan bertentangan dengan perilaku sosial.

Lebih lanjut Zamimah (2018:82) membedakan antara “Islam moderat” dan “moderasi Islam”. Ia mengungkapkan bahwa istilah “Islam Moderat” akan punya spektrum makna yang berbeda dengan “Moderasi Islam”. Istilah Islam moderat tidak pernah dikenal dalam Islam, karena Islam sebagai agama yang telah sempurna, lengkap, dan satu (QS. al-Maidah [5]: 3) tidak mengenal kategorisasi apapun dalam hakikatnya baik yang lebih bersifat negatif (Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam militan, Islam jihadis, dan lainnya), maupun kategorisasi yang lebih dianggap bersifat positif (Islam progresif, Islam moderat, Islam modernis dan lainnya). Sedangkan untuk istilah Moderasi Islam lebih berterima karena moderasi atau wasathiyah merupakan salah satu karakteristik maupun cara berfikir yang telah melekat dalam Islam itu sendiri merujuk sumber-sumbernya yang otoritatif. Jika ada sikap ekstrimis yang terjadi dalam diri umat Islam merupakan bagian dari penyimpangan yang harus diluruskan, sebagaimana sejarah umat Islam mengenal sekte khawarij, sekte qadariyyah dan jabariyyah.

Islam sebagai ajaran agama dengan pemeluknya (muslim) adalah sesuatu yang berbeda. Sebagai agama dan ajaran, Islam tidak pernah berubah. Islam sudah lengkap dan sempurna. Hanya saja, pemahaman pemeluknya terhadap Islam itulah yang berbeda-beda; ada yang lengkap dan tidak; ada yang memahami Islam dari satu aspek, sementara aspek yang lain ditinggalkan, misalnya, Islam hanya dipahami dengan tasamuh (toleransi)-nya saja, sementara ajaran Islam yang lain, yang justru melarang tasamuh tidak dipakai. Dari sini, seolah-olah Islam hanya mengajarkan tasamuh sehingga Islam terkesan permisif. Padahal kenyataannya ada yang boleh ditoleransi, dan ada pula yang tidak. Melihat Islam harus dibedakan antara Islam dan muslim sebagai subjeknya.

### 3.1. Moderat versus Radikal

Tema biner “moderat” versus “radikal” memunculkan kritik dari para akademisi. Kundnani dalam Schmid (2014) menyatakan bahwa tema biner tersebut menyamakan variasi perbedaan yang kompleks dan beragam di antara umat Islam. Hal itu juga efektif mengurangi keragaman di antara umat Islam dalam konteks ancaman keamanan. Oleh karenanya, dikotomi ini tidak hanya keliru dalam menggambarkan pengalaman keagamaan dan realitas sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi politik yang serius bagi umat Islam itu sendiri. Pada akhirnya kampanye melawan ancaman ekstremisme berkontribusi pada marginalisasi Muslim, dalam mengkategorikan Muslim sebagai ancaman keamanan potensial dan menyiratkan bahwa muslim moderat pun selalu tetap rentan terhadap radikalisasi. Banyak dari negara-negara mayoritas muslim telah terlibat dalam operasi militer melawan kelompok Muslim militan, serta dalam



berbagai strategi kekuatan lunak untuk mempromosikan Islam moderat sebagai bagian dari Perang Global Melawan Teror yang dipimpin AS.

Kerangka biner yang berasal dari kebijakan kontra-terorisme ini, telah menjadi begitu dominan dalam wacana publik di seluruh dunia sehingga sulit untuk mempelajari secara kritis penggunaan dan dampaknya tanpa jatuh kembali ke kerangka biner tersebut. Tantangannya adalah bagaimana merumuskan analisis kritis tanpa mereproduksi wacana yang membatasi dan menstigmatisasi terus menerus umat Islam. Pada saat yang sama, kita juga menghadapi tantangan lain, yaitu mengembangkan kosa kata baru yang adil terhadap keragaman pendapat politik agama di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, tantangan ini tidak dapat dipenuhi dengan solusi satu parameter untuk semua, tetapi membutuhkan berbagai pendekatan dan perspektif yang akan dikembangkan dalam kaitannya langsung dengan isu-isu spesifik dan konteks geografis yang sedang dipelajari.

Dalam diskursus moderat versus radikal, Schmid (2017:6) mengklasifikasi masyarakat muslim global sebagai sebuah lingkaran yang dimulai dari inti lingkaran paling kecil yang ditempati kaum ekstremis jihadi yang sangat kecil hingga rawan kekerasan hingga muslim yang lebih damai di lingkaran terluar.

a. Muslim Jhadis;

Mereka yang termasuk dalam kelompok ini ingin memaksakan penafsiran tentang Islam pada orang lain dengan ancaman atau penggunaan kekuatan senjata. kelompok ekstrem ini merupakan kelompok yang paling terorganisir dan paling militan. Mereka sering mendapat simpati dari sejumlah besar Muslim di lingkaran kedua, atau muslim di lingkaran terluar, tergantung pada konstelasi konflik tertentu dan keadilan yang dirasakan dari perjuangan mereka.

b. Muslim Islamis:

Lingkaran kedua ini terdiri dari kaum Islamis. Mereka mendukung “Islam politik” dan tidak mempraktekkan kekerasan tetapi seringkali menganut ideologi fundamentalis dan eksklusif yang serupa dengan jihadis. Mereka tidak membedakan bidang agama dan politik dalam masyarakat dan ingin menyebarkan hukum Islam kemudian menjadikan Islam berkuasa. Kelompok ini berusaha untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara, mulai dari persuasi hingga paksaan. Mereka bisa berjuang melalui kotak suara, menggunakan demokrasi sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya, mereka menentang pluralisme, tetapi karena alasan praktis dan pragmatis, mereka memilih untuk hidup berdampingan dengan

partai politik lain, misalnya di Tunisia (Ennahda) dan Maroko (Partai Keadilan dan Pembangunan – PJD). Ada partai-partai Islam di banyak negara mayoritas Muslim. Menurut berbagai laporan, 10 hingga 15 persen Muslim dunia adalah Islamis. Itu berarti jumlah total mereka antara 160 dan 240 juta orang. Di Arab Saudi dan Iran, rezim Islam Sunni dan Syiah berkuasa, bersaing memperebutkan dominasi regional.

c. Muslim Konservatif:

Lingkaran ketiga terdiri dari Muslim 'non-Islamis'. Lingkaran ini mencakup Muslim konservatif secara agama. Konservatif ini membentuk mayoritas Muslim di negara-negara seperti Mesir, Pakistan, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk.

Banyak dari mereka, terutama yang dipengaruhi oleh Wahhabisme Saudi, merupakan fundamentalis secara pemahaman agama. Artinya, mereka mengambil kata-kata Al-Qur'an secara harfiah, menganggapnya sebagai firman Allah yang harus diikuti per huruf di setiap saat dan di semua tempat. Ini adalah lingkaran terbesar, kemungkinan besar merupakan mayoritas dari semua Muslim. Berlawanan dengan Islamis, mereka cenderung tidak memandang Islam sebagai ideologi politik dan tidak revolusioner.

d. Muslim Pluralis:

Selain tiga lingkaran jihadis, Islamis dan Muslim konservatif ini, ada Muslim non-tradisional, yang sebagian besar tinggal di negara-negara di mana Muslim bukan agama mayoritas, terutama mereka yang tinggal di diaspora Barat. Mereka menganut interpretasi yang lebih luas tentang apa artinya menjadi Islam dan lebih inklusif dalam berbagai ekspresi keislaman mereka. Mereka termasuk muslim modern, muslim kultural, muslim Barat, muslim sosiologis, muslim progresif, dst.

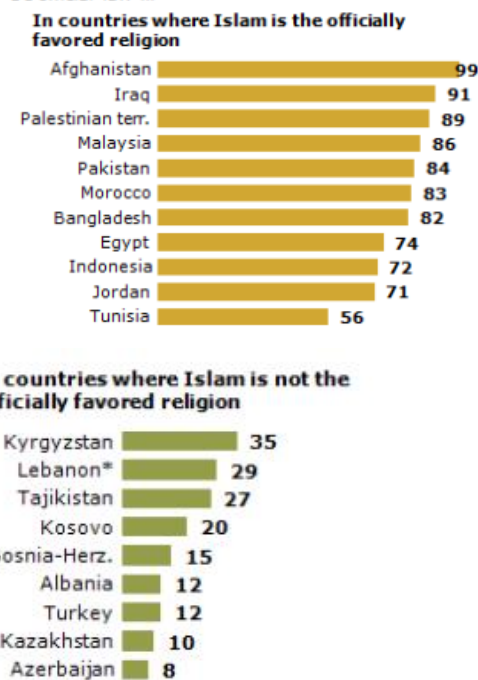
Namun berdasar klasifikasi ini, muncul pertanyaan; kriteria apa yang membuat sebuah kelompok moderat? Apakah karena mereka damai dan menentang terorisme? Atau apakah “muslim moderat” itu sebuah label yang diterapkan untuk muslim yang kebarat-baratan dan pro-Barat? Apakah ada kriteria tertentu dari Islam untuk konsep moderat? Sedangkan di kalangan Islam sendiri tidak ada konsensus tentang kriteria moderat itu sendiri.

Angel Rabasa dkk dalam sebuah studi RAND (2007) mengatakan bahwa garis pemisah antara muslim moderat dan radikal di negara-negara mayoritas muslim adalah apakah hukum syairah wajib diterapkan. Senada dengan Rabasa, Akeel Bilgrmi merumuskan moderat berkomitmen pada sekulerisme sementara absolutism berkomitmen pada Syariah.

Namun, sebagian besar muslim tentu ingin adanya penerapan Syariah. Hasil jajak pendapat publik muslim di berbagai negara menegaskan hal itu (Pew Research, 2013). Survei yang dilakukan pada tahun 2013 di 39 negara mayoritas muslim (dari total 48 negara ) menghasilkan fakta bahwa tingkat dukungan terhadap penerapan Syariah bervariasi dari tertinggi 99 persen di Afghanistan hingga terendah 8 persen di Azerbaijan, dengan mayoritas Muslim di 25 negara (di luar dari 39) berkeinginan untuk menjadikan syariah sebagai hukum resmi di tanah air mereka. Jika hukum berbasis syariah dijadikan parameter untuk membedakan muslim moderat atau bukan, maka mereka yang tergolong moderat akan menjadi minoritas dari semua negara mayoritas muslim.

**Higher Support for Sharia Where Islam Is Officially Favored Religion**

*% of Muslims who say sharia should be official law ...*



Tabel 1. Negara dengan lebih dari 50% masyarakat muslim mendukung Syariah sebagai hukum resmi (Pew, 2013). Lihat: <https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/>.

Lantas, bagaimana seharusnya kita mendefinisikan muslim moderat? Schmid (2017) memberi batasan bahwa istilah moderat digunakan untuk gerakan Islam yang berusaha mencapai tujuan mereka melalui metode bottom-up, non-kekerasan, dan mampu menerima nilai-nilai demokrasi dan mentolerir perspektif selain mereka. Dalam pengertian yang sama,

moderasi ideologis didefinisikan sebagai transformasi bertahap dari nilai-nilai inti dan keyakinan sebuah gerakan dari kaku dan statis, menjadi fleksibel dan toleran.

Schmid (2017) melanjutkan bahwa moderasi dalam politik mengacu pada perilaku kehati-hatian individu, kelompok, dan partai moderat serta platform ideologis rasional mereka, dengan keduanya terhubung karena aktor moderat cenderung mencari jalan tengah dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan pemilih dari berbagai segmen masyarakat. Kaum moderat berusaha untuk mengelola konflik kepentingan melalui dialog, keseimbangan antara posisi pihak yang berlawanan dalam kontes politik, menemukan solusi melalui negosiasi, kompromi dan reformasi, bukan melalui konfrontasi bersenjata dalam bentuk kekerasan. revolusi atau represi bersenjata. Alih-alih melihat lanskap politik dalam istilah 'hitam-putih'/baik-vs-jahat, kaum moderat mengakui bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kebenaran absolut atau solusi pasti untuk masalah masyarakat.

Kebijakan kontra-terorisme yang dikembangkan AS dan Eropa pasca serangan 11 September 2001 cenderung membingkai tindakan terorisme yang dilakukan oleh umat Islam sebagai masalah teologis, seolah-olah kekerasan tersebut secara langsung merupakan akibat dari interpretasi ekstremis terhadap Islam. Representasi stereotip Islam sebagai agama kekerasan, serta perbedaan sederhana antara muslim baik dan muslim buruk yang telah berlangsung berabad-abad lamanya berasal dari upaya kolonial Eropa (Schmid, 2017). Skema ini kemudian dihidupkan kembali dalam konteks Perang Global Melawan Teror.

Perang Melawan Teror telah memicu sekuritisasi Islam di seluruh dunia dan Islamisasi keamanan. Hampir semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam telah menjadi masalah keamanan, dan perdebatan tentang keamanan sering direduksi menjadi Islam. Pandangan ini dengan sengaja melegitimasi bentuk-bentuk pengawasan dan campur tangan negara yang luar biasa dalam urusan agama (Kundnani, 2014).

Umat Muslim bukanlah hanya korban pasif dari paradigma Barat yang bermasalah ini. Semua pihak baik individu, pemerintah, dan lembaga keagamaan Muslim berkontribusi dalam bingkai biner moderat versus radikal. Dikotomi telah ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh otoritas negara di banyak negara mayoritas Muslim, dan oleh beberapa lembaga terkemuka Ulama Islam. Perang Global Melawan Teror bersinggungan dengan kepentingan pragmatis lokal. Hal ini yang menjadikan sulitnya umat Islam untuk sepenuhnya melepaskan diri dari dikotomi ini.

Di Indonesia muncul kampanye kontra radikal berdasarkan konsep Islam Nusantara yang digagas oleh Nahdlatul Ulama (NU). NU berkepentingan memperkenalkan konsep Islam Nusantara pada tahun 2015 sebagai anti thesis dari gerakan Islam radikal seperti al-Qaeda dan ISIS yang telah membuat pandangan negatif terhadap Islam (El-Mawa, 2015).

Sementara Islam moderat di Indonesia senantiasa diidentikkan dua ormas besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan organisasi masyarakat sipil terbesar yang mewakili kelompok Islam moderat di Indonesia yang menentang gerakan salafisme. Moderasi NU dan Muhammadiyah terutama dilihat dari sikap keduanya yang mendukung negara Pancasila Indonesia dan tidak pernah memperdebatkan untuk menggantikan Indonesia dari negara pancasila menjadi negara Islam. Mereka bahkan mengubah ideologi organisasi mereka dari Islam sebagai landasan ideologis menjadi Pancasila pada tahun 1985 (Hasyim, 2013).

Islam Nusantara dianggap sebagai upaya dari kelompok “Islam Moderat” untuk melawan pengaruh Salafisme di Indonesia. Istilah Islam Nusantara, merujuk pada semangat Islam moderat di kepulauan Indonesia sejak awal kedatangan Islam. NU merupakan penggagas gerakan ini yang ingin mempromosikan model Islam Indonesia ke dunia sebagai Islam moderat, berakulturasi dengan tradisi lokal, dan menghormati kepada non muslim. NU mendasarkan gerakannya pada lima prinsip mereka dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan agama. Adapun prinsip tersebut adalah tasāmuh (toleran), tawazun (harmoni), tawasut (sedang), ta’adul (adil), dan amar ma’rūf nahi munkar (menegakkan kebaikan dan melarang yang buruk).

Islam Nusantara di Indonesia mengasumsikan bahwa seorang pemimpin tidak selalu Muslim dan sebuah negara tidak selalu Islam. Namun, yang paling penting adalah kepemimpinan dan negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam konsep politik, Islam Nusantara tidak mempermasalahkan bentuk negara. Sebuah negara tidak perlu menjadi negara Islam, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam (Chalik, 2016).

### 3.2. Pengaruh Arab Saudi di Indonesia

Pada era 60-an terjadi pertarungan antara Arab-Sosialis dan Salafi-Wahabi. Arab Saudi dalam hal ini ingin menghambat pengaruh Mesir dan Universitas Al-Azharnya dengan mendirikan Universitas Islam Madinah. Pada tahun 1970-an terjadi oil boom di Kerajaan, Saudi menjadi negara terkaya diantara negara muslim. Kesmpatan ini dimanfaatkan Saudi untuk

mengespor paham salafisme mereka ke seluruh dunia. Tentu cara efektif yang dipilih adalah melalui Pendidikan. Kekayaan yang dimiliki kerajaan menjadikan mereka sebagai penyandang dana utama selama hampir semua Lembaga Pendidikan di dunia muslim. Inilah kesempatan untuk menyebarkan wahhabisme dan kepentingan politik Kerajaan.

Hal ini pernah diungkap MBS dalam wawancaranya dengan Washington Post (22/03/2018). MBS menyatakan bahwa penyebaran Wahhabisme yang didanai Saudi dimulai sebagai akibat dari negara-negara Barat yang meminta Riyadh untuk membantu melawan Uni Soviet selama Perang Dingin.<sup>1</sup>

Pada tahun 1974 Arab Saudi mendirikan Universitas Imam Muhammad ibn Saud di Riyadh sebagai sarana terbesar penyebaran pemikiran salafisme mereka melalui pendidikan. Kampus ini memiliki lima cabang di luar negeri: UEA, Djibouti, Tokyo, Amerika Serikat dan Indonesia. Di Indonesia, cabangnya bernama LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) didirikan pada tahun 1980.

Amanda Kovacs dari GIGA (German Institute of Global and Area Studies) pada 2014 melaporkan bahwa Arab Saudi mulai menjadi pengeksport pendidikan Islam sejak tahun 1960-an. Peran ini menjadi lebih besar setelah pertarungan dengan Iran pada 1979 dengan mendirikan lebih banyak sekolah dan universitas di luar negeri. Menurut Kovacs, pendirian LIPIA merupakan reaksi Arab Saudi atas keberhasilan Ayatollah Khomeini mendirikan negara Syiah di Iran.

LIPIA merupakan proyek pertama terbesar Arab Saudi di Indonesia. Lembaga ini sangat penting karena membentuk transmisi berikutnya Salafisme ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar para pemuka Salafi Indonesia sebelumnya belajar di lembaga ini (Jahroni, 2012).

Lebih lanjut Kovacs (2014) menyebut rencana rahasia Arab Saudi dibalik pendirian LIPIA di Indonesia. Dalam skala yang lebih besar, rencana ini untuk umat Islam Indonesia dan setiap Muslim di Asia Tenggara. Mereka fokus menanamkan semangat untuk mendukung Arab Saudi dan kebijakan politik, termasuk mempromosikan ideologi Wahhabi dan menentang Syi'ah sebagai pemahaman Islam yang sesat.

Sejak berdiri pada tahun 1980 hingga tahun 2018, LIPIA memiliki kurang lebih dua puluh ribu alumni yang kemudian kembali ke kampung halaman sekitar Indonesia dan negara-

---

<sup>1</sup> lihat: <https://tribune.com.pk/story/1672777/wahhabism-spread-behest-west-cold-war-mohammed-bin-salman>, diakses 17 Februari 2024

negara Asia Tenggara lainnya. Sebagian besar alumni ini kemudian menjadikan yayasan pendidikan atau sekolahnya untuk mempersiapkan siswa dalam daerah untuk masuk ke LIPIA di Jakarta (Jahroni, 2012).

Sebagai sarana justifikasi dakwahnya, kelompok Salafi di Indonesia konsen menggunakan isu bid'ah untuk menyerang kelompok non-Salafi dan menarik Muslim awam untuk bergabung dengan Salafisme. Untuk menyebarkan ide-ide salafisme, mereka menggunakan buku, TV, radio dan media sosial. Para pelajar dan mahasiswa yang tertarik kemudian bergabung dengan halaqah mereka, perlahan mengubah pandangan mereka menjadi salafisme. Sebagaimana diungkapkan Jahroni (2012), Salafisme bertahan karena dukungan kuat dari kampus. Salafi merupakan hasil dari mahasiswa yang sebelumnya belajar di berbagai kampus di kota besar. Adapun alasan mereka ikut gerakan ini salah satunya karena keinginan bertobat dan mencari Islam yang benar.

Jahroni (2012) menambahkan, persaingan antara Islam Nusantara dan Salafisme akan terus berproses terus menerus. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, fakta ini berdampak pada kepentingan banyak pihak. Di sisi domestik, angka ini memberikan harapan mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya untuk memperkuat sosial dan keuntungan ekonomi karena pengikut yang banyak berarti pendapatan yang besar. Tapi ini persaingan memberikan dampak buruk bagi umat Islam yang terikat di dalam negeri.

### 3.3. Peran Ikhwanul Muslimin (IM) di Arab Saudi

Arab Spring yang dimulai tahun 2011 di Tunisia hingga Suriah telah menjadikan gerakan perubahan dalam bidang sosial-politik di Timur Tengah. Mandaville (2014) memprediksi bahwa fenomena yang dimulai dengan pembakaran diri penjual buah di Bouazizi dapat menggulingkan rezim-rezim yang berkuasa di Timur Tengah. Adanya Arab Spring merupakan sebuah penanda bahwa civil society di negara-negara Timur Tengah sangat menginginkan adanya perubahan. Arab Spring adalah momentum bagi kelompok modernis di negara otoriter untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya akan ide-ide perubahan sistem pemerintahan yang mengakar kuat di Kawasan.

Khusus Saudi, disamping berpengaruh pada wilayah Saudi bagian timur yang didominasi oleh warga dengan sekte Islam Syiah, Arab Spring juga berpengaruh pada gerakan-gerakan yang mengarah kepada kegiatan revolusi yang ditangan the Saudi Sunni Islamists' Reformist atau kaum reformis dari sekte sunni Saudi (Lacroix: 2011).

Adapun gerakan yang punya andil besar dalam gerakan revolusi di Arab Saudi –sejak tahun 1990an sering disebut sebagai al-Sahwa, atau Al-Sahwa al-Islamiyya yang dalam arti dari bahasa Arab sebagai The Awakening atau kebangkitan Islam (Al- Rasheed:2011). Al-Shahwa merupakan penggabungan antara doktrin konservatif Wahhabisme kesadaran berpolitik dari pemahaman Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin (IM) pertama muncul di Saudi tahun 1940 dan 1950an ditandai dengan pertemuan Hasan Al-Banna sebagai pendiri IM dengan Raja Abdulaziz Al Saud pada tahun 1936 (Al- Jazeera: 2017).

Hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin (IM) sejak awal mula masuknya ke Saudi pada 1937 dinilai ambigu namun saling berketergantungan satu sama lain. Waktu itu Saudi melihat Ikhwan bukanlah sebuah ancaman karena tidak melakukan kekerasan (violent) atau pemberontakan pada kerajaan. Saudi lebih melihat apakah sebuah gerakan mendukung atau mengancam otoritas pemerintahan. Pandangan itu pula yang diberlakukan Kerajaan ke gerakan al-Sahwa (Alternan, McCants:2014).

Selain itu, pada tahun 1960-an, terjadi "Perang Dingin Arab" antara negara Arab nasionalis dan sosialis yang dipimpin oleh Presiden Mesir gamal Abdul Nasser dan didukung oleh Uni Soviet, melawan negara-negara blok Islam, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan didukung oleh Amerika Serikat. Dalam rangka menangkal pengaruh sosialis, pada tahun 1961 pemerintah Saudi mendirikan Universitas Madinah. Universitas Madinah kemudian menjadi pusat utama iradiasi Islam Wahhabi di dunia. Universitas ini dan universitas Saudi lainnya merekrut nama-nama penting dari Ikhwanul Muslimin (Muhammad Qutb, adik Sayyid Qutb), Salafisme (Nashirudin Al-Albani) dan Jihadisme (Abdullah Azzam, ideologis jihad Afghanistan) sebagai profesor.

Penerimaan terhadap Hasan Al-banna menjadi tanda dimana pada saat itu Saudi menerima keberadaan dari IM yang dianggap sebagai sebuah ancaman oleh Mesir pada saat itu yang tengah gencar dengan gerakan Pan- Arabisme nya. Lebih lanjut Raja Abdulaziz pernah menyatakan " We are all Brothers" atau kita semua adalah bersaudara. Bahkan, Um al-Qura salah satu berita kabar di Saudi menuliskan berita kontroversial yang berjudul "Hassan Al-Banna You are Welcome" menandakan bagaimana pada awalnya Saudi bersikap menerima kehadiran IM (Qandil, 2018).

Di kemudian hari Saudi menjadi tempat berlindung ribuan orang Mesir yang memiliki afliasi dengan IM yang menghadapi pengusiran dari masa pemerintahan Gamal Abdel Nasser. Saudi menerima ribuan eksodusorang-orang yang berafiliasi dengan IM karena kurangnya



tenaga kerja guru dalam pendidikan nasional, yang secara garis besar memiliki pemikiran conservative pious Arab Muslim (Karen Elliot:2012). Sedangkan argumen lain berpendapat bahwa hubungan yang dibuat oleh pihak pemerintahan Saudi dan IM sebenarnya menguat pasca penolakan Mesir untuk mengakui model baru pemerintahan kerajaan Saudi (Qandil:2018).

Penempatan tokoh-tokoh IM didalam sistem pendidikan di Saudi pada saat lambat laun menjadikan gerakan ini sangat mudah untuk memasuki kancah kaum muda melalui penyebaran ideologinya. Keputusan Raja Faishal untuk memperkuat posisi IM didalam pemerintahan Saudi pada saat itu dapat dikatakan sebagai counter-back dari Pan-Arab Socialism yang telah diperkuat keberadaannya oleh Nasser (Lacroix:2014). Lacroix dalam tulisannya juga berpendapat bahwa, the Arab Cold War yang pernah terjadi antar Saudi dan Mesir, sebenarnya telah memberikan IM panggung untuk menyebar luasakan ideologinya melalui berbagai macam platform atau sarana yang ada didalam kerajaan.

Gelombang kedua kedatangan intelektual Ikhwan terjadi saat Saudi mulai mengembangkan pendidikan tinggi. Muhammad Qutb yang merupakan adik kandung Sayyid Qutb pernah menjadi dosen di Universitas Ummul Qura. Pada saat pemerintah Saudi mendirikan Universitas Islam Madinah tahun 1961, sebagian staf dan pengajarnya merupakan aktivis Ikhwan. Dibukanya Universitas Islam Madinah bagi mahasiswa luar negeri berdampak pada penyebaran ajaran Ikhwan dalam skala internasional. Lebih lanjut berdirinya beberapa organisasi Islam yang didukung penuh Saudi seperti Liga Muslim Dunia pada tahun 1962, serta Majelis Pemuda Muslim Dunia menjadi saluran bagi aktivis Ikhwan dalam memperluas pengaruh dan jaringan di kalangan kaum muda di seluruh dunia serta diaspora muslim di Eropa dan Amerika (Lacroix, *Awakening Islam*, 46).

Ikhwan waktu itu menguasai bidang Pendidikan dan organisasi di Saudi, namun tidak bisa masuk ke Lembaga tradisional Ulama Arab Saudi yang dikuasai oleh ulama aliran Wahabi, misalnya Peradilan Syarah dan Mejelasi Ulama Senior (Haiah Kibar Ulama) Arab Saudi. Mandaville (2014) menyebutkan bahwa pemikiran nasionalisme yang dikonstruksi oleh Hasan al-Banna mengandung pandangan penolakan terhadap kehadiran Barat di dalam dunia muslim. Pemikiran tersebut terrefleksikan dalam sikap yang ditunjukkan IM yang menganggap kebijakan Saudi untuk meminta bantuan AS sebagai posisi yang kurang tepat.

Lacroix (2014) menyebut Invasi Irak ke Kuwait yang disusul perlawanan Saudi dalam perang yang dipimpin AS kemudian menciptakan ketegangan besar hubungan IM dengan

Kerajaan. Beberapa cabang Ikhwan secara terbuka mengkritik kehadiran militer AS di Arab Saudi atas permintaan Raja Fahd. Dalam situasi ini dimulai pula formasi pembentukan Sahwa Islamiyah yang pada saat itu turut memberikan protes dengan meluncurkan kampanye untuk menuntut reformasi politik termasuk melayangkan surat terbuka kepada Raja.

Ikhwan bukanlah organisasi yang resmi di Arab Saudi sehingga Ikhwan berkembang secara informal sebagaimana terjadi di Mesir dan Aljazair Ikhwan berkembang melalui klub-klub perkumpulan pemuda berupa hobi, olahraga, perkemahan pelajar, aksisosial dan perkumpulan penhafal Quran. Melalui cara inilah Ikhwan mengakar di masyarakat Saudi pada tahun 1970-an.

Di kemudian hari, sebagian pengikut Ikhwan yang memiliki kecenderungan seperti ulama Suriah seperti Syaikh Muhammad Surur dimana mereka punya keengganan untuk mengkritik, menentang atau berkonfrontasi kepada pemerintah. Mereka kemudian membuat kelompok sendiri yang terkenal dengan sebutan Salafi Sururi. Sementara kaum muda Ikhwan Saudi yang tersentuh Pendidikan Barat dan merasakan iklim politik yang demokratis dan penuh keterbukaan, cenderung mengikuti gerakan As-Shahwa al-Islamiyah.

Pada saat Meletus Perang Teluk tahun 1990, Sahwa melakukan protes keras terhadap pemerintah Arab Saudi karena meminta bantuan 500 ribu pasukan internasional terutama dari Amerika untuk menyerang Irak. Sahwa kemudian melayangkan Surat Permintaan pada tahun 1991 agar Pemerintah Saudi kembali kepada pijakan Islam yang benar.

Raja Fahd beserta Ulama wahabi Saudi mengecam aksi aktivis Sahwa tersebut dengan memvonis bahwa ulama dan pengikut Sahwa telah melenceng. Banyak aktivis Sahwa dibekuk dan ditangkap dan disiksa pemerintah termasuk pemimpin mereka, Syekh Safar Al-Hawali dan Syekh Salman Al-Awdah. Sahwa kemudian membentuk Lajnah ad-Difa'an al-huquq as-Syar'iyyah ( Committee for the Defence of Legitimate Rights) yang terus menyebar rekaman dan kaset yang berisi petisi dan kritik terhadap pemerintah Saudi. Kepemimpinan Komite ini kemudian berpindah ke Inggris dan terus menyuarakan protes akan kebijakan Raja Fahd. Pada tahun 1993 muncullah Dekrit Raja untuk membentuk kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan yang melakukan control ceramah dan otoritas ulama Saudi agar setia pada Kerajaan serta mengganti ulama-ulama Sahwa di semua posisi mereka. Raja Fahd kemudian melakukan pembersihan para ulama yang diduga berafiliasi dengan Ikhwan dengan mengusir Syaikh Muhammad Qutb dari Universitas Ummul Qura.

Terkait isu tersebut, terdapat keterangan pihak Kerajaan yang disampaikan Pangeran Nayef selaku Menteri dalam negeri pada November 2002 sebagaimana dikutip Lacroix (2014:37) :

When the situation became difficult for the Muslim Brotherhood . . . they found refuge in the kingdom, which welcomed and protected them, and, after God, guarded their lives. After they had spent a few years among us, we realized that they needed work, so we found ways for them to support themselves: some of them became teachers, others university professors— we opened the doors of schools and universities to them. But unfortunately, they had not forgotten their earlier affiliations, and they began to recruit people, to create movements, and they rose up against the kingdom!

Ikhwan kemudian secara resmi menjadi kekuatan oposisi di Kerajaan. Hoffman (2019) menyatakan bahwa Arab Spring telah memberikan ruang yang signifikan untuk pihak yang dianggap sebagai oposisi oleh Kerajaan. Dampaknya, Pemerintah Saudi mengambil tindakan represif untuk menanggapi fenomena Al-Sahwa dengan penangkapan tokoh dan Ulama yang memiliki afiliasi dengan gerakan ini (Hoffman:2019). Karena gerakan al-Sahwa dianggap mendapatkan momentumnya kembali dalam perpolitikan kontemporer di Arab Saudi, MBS pada tahun 2017 kemudian membungkam Saudi Muslim Scholars Salman Al-Awdah, Awad Al-Qarni dan Ali al-Qomari yang dianggap memiliki afiliasi dengan kelompok Al-Sahwa.

Pemikiran Al-Audah lain yang mengganggu Kerajaan adalah ia mempromosikan wacana hibrida, yang menggabungkan pemikiran politik Barat dengan tradisi Islam. Al-Audah mengadopsi gagasan revolusi damai dari Barat yang dipahami sebagai pencarian perubahan politik melalui tindakan kolektif yang memanifestasikan dirinya dalam kondisi politik, sosial, psikologis dan ekonomi tertentu. Al-Audah membaratkan gagasan Islam tentang syira (konsultasi). Menurutnya, seluruh komunitas Islam dan bukan hanya segelintir orang terpilih seperti yang terjadi saat ini di Arab Saudi, harus bisa mengakses mekanisme tersebut. Al-Audah menyatakan penerapan syariah sudah tepat tetapi tidak bisa dipaksakan; ia merehabilitasi gagasan ijtihād, penalaran pribadi, sebagai lawan dari taqlid, imitasi buta yang dianjurkan oleh Wahhabisme. Al-'Awda juga berteori tentang gagasan negara yang didirikan berdasarkan kontrak sipil antara masyarakat dan pemerintah, yang menetapkan pembagian tiga kekuasaan – eksekutif, legislatif dan yudikatif – dan meyakini bahwa tidak ada ruang untuk teokrasi dalam Islam.

### 3.4. Wacana Moderasi Islam oleh MBS

Dalam upaya mewujudkan Visi Saudi 2030, MBS melakukan langkah-langkah besar yang terkadang bertentangan dengan pandangan konservatif ulama. Hal ini termasuk mengabaikan fatwa-fatwa ulama yang dianggap menghambat kemajuan menuju modernisasi. Salah satu aspek yang diabaikan adalah fatwa yang membatasi hak dan peran perempuan. Bagi MBS, perempuan Saudi harus memiliki hak yang sejajar dengan kaum laki-laki serta berperan produktif dan aktif di ruang publik agar dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan Visi Saudi 2030.

MBS kemudian berupaya mengubah citra Kerajaan Arab Saudi yang sebelumnya dikenal konservatif menjadi moderat. Menurut MBS, Arab Saudi kini berbeda dengan Arab Saudi 30 tahun silam. Sebagaimana yang ia ungkapkan dalam wawancara pada Forum Future Investment Initiative, MBS menegaskan dan bersumpah untuk mengembalikan negara itu ke Islam moderat yang menurutnya sudah berubah pasca revolusi Iran 1979. Lebih lanjut MBS mengungkapkan;

"السعودية لم تكن كذلك قبل 1979. فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام الوسطي المعتدل و  
المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب

“Arab Saudi tidak seperti itu sebelum tahun 1979. Kami tidak pernah seperti ini di masa lalu, Sekarang kami hanya kembali ke keadaan semula, kepada Islam yang moderat dan terbuka bagi semua agama, tradisi dan masyarakat.”

Tahun 1979 merupakan tonggak sejarah bagi perubahan Kawasan Timur Tengah. Revolusi Iran pada tahun itu menandai awal dari benturan antara Islam revolusioner dan Islam Konservatif. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari pengaruh revolusi, Arab Saudi kemudian mencounter dengan mengaktifkan komponen anti-Syiah yang melekat pada paham wahhabisme (Wahyudhi, 2019:57).

Pada tahun 1979 juga situasi politik internal Saudi memanas. Pada tanggal 20 November terjadi pemberontakan dari Ikhwan Juhaiman al-'Utayb yang menduduki Masjidil Haram di Mekah. Adapun tujuan akhir dari operasi tersebut adalah untuk membaiat Muhammad al-Qahtan, sahabat Juhaiman, sebagai al-Mahdi. Tanggal pemberontakan itu adalah hari pertama abad kelima belas dalam kalender Islam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, “pada

---

Al-Arabiya Arabic , 24 October 2017. *Mohammed bin Salman: Kami akan menghancurkan Ekstremisme dan*<sup>2</sup>  
*hidup secara normal.* محمد بن سلمان: سندمّر التطرف ونعيش حياة طبيعية  
"<https://www.youtube.com/watch?v=ChAqsVBazMw>, diakses 5 Maret 2024.

awal setiap abad Allah akan mengirimkan kepada umat-Nya seseorang sebagai pembaharu agama” (HR. Abu Daud).

Pengepungan Masjidil Haram yang berlangsung dua minggu pada akhirnya berakhir setelah intervensi pasukan khusus Prancis, yang diundang Raja. Keputusan ini juga menimbulkan penentangan dari sebagian besar Islamis Saudi, yang mengkritik kehadiran orang asing di tempat paling suci Islam.

Kerajaan kemudian memanfaatkan front lain sebagai upaya menyingkirkan kelompok ekstremis dan berpotensi subversif dari Kerajaan. Pada 24 Desember 1979, terjadi invasi Soviet ke Afghanistan. Pemerintah Saudi, yang didukung oleh ulama Wahhabi, meluncurkan kampanye yang mendukung jihad, dan bahkan mengganti 75% tiket pesawat kepada umat Islam dari berbagai negara yang akan berperang.

Sebenarnya tahun 1979 tidak dapat dianggap sebagai tahun nol pergeseran kearah fundamentalis, yang dianggap sebagai asal dari semua bencana Arab Saudi saat ini oleh MBS. Jauh sebelumnya pada tahun 1960-an, Saudi mendukung kemunculan al-Sahwa al-Islamiyah. Gerakan Sahwa yang berarti kebangkitan (The Awakening) merupakan kombinasi ideologi keagamaan dan kecenderungan politik dari penggabungan antara doktrin konservatif Wahhabisme dan —Political Consciousness— atau kesadaran berpolitik dari pemahaman Ikhwanul Muslimin yang sempat dianggap menjadi ancaman oleh pemerintahan Mesir dibawah Gamal Abdul Nasser pada tahun 1954 (Alterman, MacCants:2014). Gerakan As-Sahwa dipimpin oleh Safar Al-Hawali dan Salman Al-Awdah. Berbeda dengan IM dari negara asalnya, gerakan ini masih mengadopsi sufisme, tetapi sama-sama memiliki tendensi politik yang kuat (Wahyudhi, 2019:46).

Setelah pernyataan MBS yang ingin memberantas ekstremisme di Kerajaan, terjadi revitalisasi pusat-pusat hiburan di Arab Saudi serta pemberian kebebasan kepada kaum perempuan untuk bekerja, mengemudi, dan terlibat dalam politik. Ajang Riyadh Season 2019—2023 menjadi gambaran bagaimana MBS ingin memperkenalkan versi baru Islam Saudi dengan menggelar konser musik internasional yang menampilkan artis-artis ternama seperti Mariah Carey, Pitbull, BTS Korea, WWE Crown Jewel, dan Black Pink. Hal ini mencerminkan upaya untuk melakukan diversifikasi sektor nonminyak, termasuk pembangunan sektor pariwisata. Saudi telah membangun situs wisata kelas dunia di Kawasan Laut Merah dengan fasilitas modern. Bahkan, di pantai, kaum perempuan diizinkan untuk memakai bikini (Arabian Business, 9/01/2023).

Reformasi ekonomi mengharuskan adanya reformasi sosial. Visi Saudi 2030 juga menghendaki perombakan sosial-budaya di Kerajaan. Selain terbukanya ruang publik bagi perempuan, salah satu terobosan sosial MBS adalah dibukanya kembali bioskop sejak Mei 2018. Kebijakan sudah tentu membutuhkan rasionalisasi. Menteri Kebudayaan dan Informasi, Dr. Awwad al-Awwad, menyatakan, “Langkah ini hadir sebagai bagian dari reformasi sosial dan ekonomi dalam bingkai Visi Saudi 2030 di bawah kepemimpinan MBS. Keputusan untuk mengizinkan bioskop adalah inti program pemerintah untuk mendorong dan mengapresiasi budaya lokal yang terbuka serta memperkaya kebudayaan masyarakat Saudi” (Riyadhconnect.com, 12/12/2018).

Agenda yang diperkenalkan oleh MBS bertujuan untuk mengurangi stigma konservatif dan fundamentalis yang melekat pada Arab Saudi di mata dunia internasional. MBS berusaha menampilkan gambaran Arab Saudi yang lebih inklusif. Namun, di dalam negeri, prinsip konservatisme yang telah ditanamkan oleh ulama selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari identitas yang sulit untuk diubah.

Pemerintah Saudi telah sekian lama menjalin hubungan saling menopang (mutual-relation) dengan para ulama konservatif. Hubungan ini telah terjalin sejak awal Kerajaan berdiri. Ulama konservatif ini berperan aktif dalam memformulasikan model kebijakan hukum yang kemudian diimplementasikan para pejabat negara. Dengan kata lain, pemerintah Saudi mengokohkan otoritasnya melalui peran ulama. Tidak hanya hubungan pragmatis dan saling memberi dukungan, ulama dan pemerintah Saudi bahu-membahu menjawab persoalan bagaimana model negara Islam termasuk bagaimana negara menyikapi modernisasi.

Sementara kebijakan moderasi MBS dalam Visi Saudi 2030 terjadi secara mendadak tanpa persetujuan dari otoritas ulama. Ulama di sisi lain pada akhirnya akan menjadi batu penghalang bagi misi reformasi MBS terutama sektor pariwisata yang membuka keterbukaan bagi budaya asing. Hal tersebut karena arus modernisasi akan mempengaruhi kultur keagamaan yang sekian lama dibangun oleh para ulama konservatif.

Dalam konteks tersebut MBS kemudian memunculkan istilah wasathiyah (moderasi) Islam sebagai sebuah wacana untuk menjadikan ide-ide reformasi dan modernisasi Saudi dapat berterima, khususnya di kalangan ulama konservatif. Islam wasathiyah juga digunakan untuk mengambil alih otoritas keagamaan Saudi. Islam wasathiyah berusaha memenggal habis kekakuan dan ekstrimisme dalam beragama. MBS membutuhkan pemahaman Islam yang lebih modern dan lebih mampu merespon perubahan zaman akibat globalisasi. Globalisasi menantang

paradigma keagamaan klasik dan konservatif untuk hijrah ke format yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Islam moderat menjadi alternatif Kerajaan Saudi untuk menggeser posisi wahabisme (Derham, 2023).

Setelah dilantik menjadi Putra Mahkota Arab Saudi, MBS mengumumkan tindakan keras terhadap ulama ekstremis, berjanji untuk mengembalikan kerajaan ke “Islam moderat”(Al-Arabiya Arabic, 24/10/ 2017):

“وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السامح وعاداتنا وتقاليدها الطيبة”

” kami tidak akan menyia-nyiakan 30 tahun hidup kami untuk berurusan dengan ide-ide ekstremis. Kami akan menghancurkannya hari ini, karena kami ingin menjalani kehidupan normal yang menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut.”

Namun kenyataannya sebagian besar ulama yang menjadi target MBS sama sekali tidak ekstrem. Sebagian ulama yang dikirim ke penjara memiliki catatan panjang dalam mengkampanyekan reformasi dan moderasi agama yang justru ingin MBS wacanakan. Sementara itu, kelompok garis keras agama dan kritikus terkenal tentang rencana reformasinya tetap melenggang dengan profesi mereka di Arab Saudi tanpa hambatan.

Foreign Policy mencatat, puluhan ulama, jurnalis dan akademisi lainnya, ditangkap oleh pasukan keamanan Saudi pada September 2017. Selama tahun berikutnya, menurut seorang pejabat Arab yang dekat dengan pemerintah Saudi, 5.000 ulama lainnya diam-diam dipanggil dan dipaksa untuk memberikan janji bahwa mereka tidak akan mengkritik pemerintah. Bertentangan dengan apa yang MBS sampaikan soal tindakan keras bagi ekstremis kepada Barat, operasi tersebut sama sekali tidak menargetkan pandangan ekstremis. Pemerintah justru mengejar mereka yang dapat mengkritik kebijakannya dan berpotensi memobilisasi massa melawan kekuasaannya.

Haiah Kibar Ulama Saudi, Badan keagamaan tertinggi kerajaan menjadi contoh standar ganda ini. Dewan yang beranggotakan 21 orang itu bertugas memberi nasihat kepada raja tentang masalah-masalah agama dengan mengeluarkan fatwa-fatwa. Para anggota dipilih sendiri oleh raja dan dibayar oleh pemerintah. Di antara badan keagamaan yang sebagian besar ultrakonservatif ini, setidaknya dua anggota telah menimbulkan kontroversi karena ideologi ekstremis mereka.

Penangkapan para ulama dan aktivis Saudi dapat menjadi salah satu penanda bahwa kebijakan yang diambil oleh MBS lebih cenderung represif pada perbedaan pendapat alih-alih membebaskan kalangan reformis yang punya kemungkinan akan menindaklanjuti modernisasi yang digagasnya. Persoalan utama reformasi sosial-politik MBS terletak pada ketidakjelasan siapa yang dapat mengambil peran mereformasi Islam Saudi saat kalangan ulama konservatif (Wahhabi) tidak tertarik untuk mempromosikan reformasi, dan sebagian besar tokoh ulama reformis Muslim terkemuda justru berada dalam penjara.

#### 4. Kesimpulan

Istilah *wasathiyah* yang disejajarkan moderasi Islam merupakan konsep orisinal yang berasal dari Islam dengan segala kandungannya sebagaimana disebut Al-quran dan Hadits. Wasathiyah mengarah pada makna seputar *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Wasathiyah juga bermakna adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

Muhammad bin Salman (MBS) memilih wacana moderasi Islam (*Islam wasathiyah*) sebagai *governmentality* untuk mewujudkan agenda reformasi Kerajaan Arab Saudi dalam Visi Saudi 2030 dengan beberapa langkah strategis. MBS memahami bahwa masyarakat Saudi yang konservatif secara sosial, agama, dan budaya membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Dengan mengusung narasi moderasi Islam, MBS mencoba untuk mengubah pemahaman tradisional tentang agama dalam masyarakat Saudi dan menawarkan sebuah visi yang lebih inklusif dan moderat.

MBS menggunakan moderasi Islam sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya dari kalangan yang awalnya mungkin skeptis terhadap agenda reformasinya. Dengan menekankan nilai-nilai moderasi, MBS dapat mereduksi resistensi terhadap perubahan sosial dan budaya yang dia usulkan, sambil memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin yang mengikuti arus zaman.

Dengan demikian, MBS memilih moderasi Islam sebagai *governmentality* untuk mewujudkan agenda reformasi Kerajaan Arab Saudi dalam Visi Saudi 2030 karena dianggap sebagai pendekatan yang strategis secara politik, sosial, dan ekonomi.



## Referensi

- Ad-Dzuhaili, Wahbah. 2010. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy walqadhaya Al-Mua'shirah*, vol 13, Damaskus: Daarul Fikr.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1983. *al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1404/1983.
- Al-Rasheed, Madawi. 2011. *Counter-Revolution: Saudi Responses to the Arab Spring*, *Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 11, No. 3*.
- As-Shalabi, Ali Muhammad Muhammad. 2001. *al-Wasathiyah fi Al-Qur'an*. Kairo: Maktabat at-Tabi'in.
- Alterman, Jon B. and William McCants. 2019. *Saudi Arabia: Islamist Rising and Falling*, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Joint Project of the Middle East Program and Transnational Project Accessed on: <https://www.csis.org/>.
- Azra, A. 1994. *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*. Mizan Publishing.
- Chalik, A. 2016. *The Position of Islam Nusantara in Geopolitical Dynamics of Islamic World*. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.311>
- Christomy, Tommy. 2002. *Indonesia, tanda yang retak*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.
- El-Mawa, M. (2015). *Teks dan Karakter Islam Nusantara..* <https://www.nu.or.id/post/read/58821/teks-dan-karakter-islamnusantara>
- Hoffman, Jonathan. *Religion, State, and Politics in Saudi Arabia*. 2019. *Middle East Policy*, Vol. XXXVI, No. 3.
- Hasyim, S. 2013. *State and Religion: Considering Indonesian Islam as Model of Democratisation for the Muslim World*. Friedrich - Naumann-Stiftung für die Freiheit.
- Jahroni, Jajang. 2012. *The Political Economy of Knowledge Shariah and Saudi Scholarship in Indonesia*. *Journal of Indonesian Islam*, the Institute for the Study of Religion and Society (LSAS) and the Postgraduate Program (PPs), IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kovacs, A. 2014. *Saudi Arabia Exporting Salafi Education and Radicalizing Indonesia's Muslim*. *GIGA Focus*. Leibniz-Institut für Globale Und Regionale Studien.
- Lacroix, Stephane. 2011. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissert in Contemporary Saudi Arabia*, Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts London.
- Lacroix, Stephane. 2004. *Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia's New Islamo-Liberal Reformists*. *Middle East Journal*. <https://www.jstor.org/stable/4330029>

- Lacroix, Stephane. 2014. Saudi Arabia's Muslim Brotherhood predicament. The Washington Post. [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brother-hood-predicament/?utm\\_term=.f3b04fe78fc2](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brother-hood-predicament/?utm_term=.f3b04fe78fc2)
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, Fauziah. 2021. Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist, Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif.
- Pew Research (2013). The Worlds Muslim Relegion Politic Society Overview: <https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/>
- Qodir, Z. 2016. Islam Nusantara as Moderate and Tolerant Islam: a Literature Research. Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 69–84. <https://doi.org/10.14421/jpi.2016.51.69-84>
- Qandil, Mohammad Mokhtar (2018). The Muslim Brotherhood and Saudi Arabia: From Then to Now. <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-muslim-brotherhood-and-saudi-arabia-from-then-to-now>
- Saifuddin, Lukman Hakim. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan DiklatKementerian Agama RI.
- Schmid, A. P. 2013. Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review. Terrorism and Counter-Terrorism Studies. <https://doi.org/10.19165/>
- Schmid, A. P. 2017. Moderate Muslims and Islamist Terrorism: Between Denial and Resistance. ICCT Research Paper. <https://doi.org/10.19165/2017.1.09>
- Tim Komisi Dakwah dan Pengembagngan Masyarakat-MUI. 2019. Islam Wasathiyah, . Jakarta: Komisi Dakwah dan Pengembagngan Masyarakat-MUI.
- Van Es, Margaretha A, Nina ter Laan & Erik Meinema. 2021. Beyond 'radical' versus 'moderate'? New perspectives on the politics of moderation in Muslim majority and Muslim minority settings. Religion, 51:2, 161-168, DOI: 10.1080/0048721X.2021.1865616
- Wahyudhi, Nostalgawan. 2019. Problematika Kekuatan Islam Politik di Arab Saudi (dalam buku: Politik Islam Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab. ed: Muhamamd Fakhry Ghafur. Jakarta: LIPI Press.
- Zamimah, Iffati. 2018. Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab), Jurnal Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Volume 1, Nomor 1, Juli 2018.

Sumber berita:

- Al-Jazeera (2017). Saudi and the Brotherhood: From Friends to Foe. <https://www.aljazeera.com/news/2017/6/23/saudi-and-the-brotherhood-from-friends-to-foes>, diakses 20 Februari 2024.
- Arab News (2017). Full Transcript: Crown Prince Mohammed bin Salman interview with Saudi journalist Abdullah Al-Mudaifer: <https://www.arabnews.com/node/1850146/media>, diakses 2 Maret 2024.
- Al-Arabiya (2017). MBS Ingin Timur Tengah Jadi New Eropa (Arabic). <https://www.youtube.com/watch?v=Dmck4kNGjpg>, diakses 24 Februari 2024.
- Foreign Policy (2019). Mohammed Bin Salmans Fake Anti-Extremist Campaign. <https://foreignpolicy.com/2019/06/13/mohammed-bin-salmans-fake-anti-extremist-campaign/>, diakses 10 Maret 2024.
- The Guardian (2017). I Will Return Saudi Arabia Moderate : Crown Prince. <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince>, diakses 13 Maret 2024.
- Washington Post (2018). Saudi prince denies Kushner is 'in his pocket'. [https://www.washingtonpost.com/world/national-security/saudi-prince-denies-kushner-is-in-his-pocket/2018/03/22/701a9c9e-2e22-11e8-8688-e053ba58f1e4\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/saudi-prince-denies-kushner-is-in-his-pocket/2018/03/22/701a9c9e-2e22-11e8-8688-e053ba58f1e4_story.html), diakses 15 Maret 2024.